



Evaluasi Kinerja Aparatur Berbasis Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efektivitas Layanan Administrasi Publik Modern

Asriyani^{*1}, Zakky Zamrudi², Syahril Shaddiq³

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) MAB Banjarmasin^{1,2}

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin³

*Email Korespondensi: aciwara@gmail.com

Diterima: 19-11-2025 | Disetujui: 29-11-2025 | Diterbitkan: 01-12-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of digital technology in the performance evaluation process of civil servants and its impact on the effectiveness of modern public administration services. The urgency of this study is based on the demands of bureaucratic transformation in the digital era, which requires government officials to be able to work faster, more accurately, and more accountably. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation studies of the performance evaluation process that takes place in the sub-district bureaucracy. The results of the study show that the use of digital technology, such as online attendance applications, personnel information systems, and internet-based communication media, can improve the accuracy of performance assessments, speed up reporting, and strengthen coordination between officials. The findings also reveal that the use of digital technology contributes to increased transparency, work efficiency, and the quality of public administration services, even though a number of obstacles are still encountered, such as limited digital literacy and internet infrastructure. Overall, this study concludes that the digitization of civil servant performance evaluations is an effective strategy in promoting the modernization of public services and strengthening bureaucratic accountability, and therefore needs to be optimized through capacity building among civil servants and the development of more adequate technological facilities.

Keyword : Performance Evaluation; Digital Technology; Public Services

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi digital dalam proses evaluasi kinerja aparatur serta dampaknya terhadap efektivitas layanan administrasi publik modern. Urgensi penelitian ini didasarkan pada tuntutan transformasi birokrasi di era digital yang menuntut aparatur pemerintah mampu bekerja secara lebih cepat, akurat, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap proses evaluasi kinerja yang berlangsung di lingkungan birokrasi tingkat kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital seperti aplikasi presensi online, sistem informasi kepegawaian, serta media komunikasi berbasis internet mampu meningkatkan akurasi penilaian kinerja, mempercepat alur pelaporan, dan memperkuat koordinasi antaraparatur. Temuan penelitian juga mengungkap bahwa pemanfaatan teknologi digital berkontribusi pada peningkatan transparansi, efisiensi kerja, serta kualitas pelayanan administrasi publik meskipun sejumlah kendala masih dijumpai, seperti keterbatasan literasi digital dan infrastruktur internet. Secara keseluruhan, penelitian ini

menyimpulkan bahwa digitalisasi evaluasi kinerja aparatur menjadi strategi efektif dalam mendorong modernisasi pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas birokrasi, sehingga perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan sarana teknologi yang lebih memadai.

Kata Kunci : Evaluasi Kinerja; Teknologi Digital; Layanan Publik

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Asriyani, Zakky Zamrudi, & Syahrial Shaddiq. (2025). Evaluasi Kinerja Aparatur Berbasis Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efektivitas Layanan Administrasi Publik Modern. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 1721-1734. <https://doi.org/10.63822/dn9cvp47>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk dalam peningkatan kualitas layanan administrasi publik (Fadri & Fil, 2024). Transformasi birokrasi yang semakin terdigitalisasi menuntut aparatur pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan berbagai instrumen digital dalam menjalankan tugasnya, terutama pada proses evaluasi kinerja yang menjadi instrumen penting dalam menentukan kualitas layanan publik (Lumbanraja et al., 2025). Proses evaluasi kinerja tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan manual yang cenderung lambat, subjektif, dan kurang akuntabel (Rismawati & Mattalata, 2018). Kehadiran teknologi digital seperti aplikasi presensi online, sistem informasi kepegawaian, serta platform komunikasi berbasis internet memberikan peluang bagi instansi pemerintahan untuk membangun mekanisme evaluasi kinerja yang lebih efisien, transparan, dan terukur (Widiyastutin & Yeni, n.d.). Namun demikian, implementasi digitalisasi evaluasi kinerja belum sepenuhnya berjalan optimal pada tingkat pemerintahan lokal, sehingga masih ditemukan kendala seperti keterbatasan literasi digital aparatur, minimnya infrastruktur pendukung, serta belum adanya sistem evaluasi yang terpadu (Alrizqan, 2025). Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas layanan administrasi publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat (Bunda & Tjenreng, 2025).

Permasalahan utama dalam konteks ini adalah bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan kualitas dan akurasi evaluasi kinerja aparatur sehingga layanan administrasi publik dapat diselenggarakan secara lebih cepat, akuntabel, dan responsif. Tantangan muncul ketika sebagian aparatur belum terbiasa menggunakan instrumen digital secara maksimal, sementara tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang profesional semakin meningkat. Selain itu, perubahan pola kerja digital belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem evaluasi kinerja, sehingga efektivitas transformasi birokrasi belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk memahami sejauh mana teknologi digital telah digunakan dalam proses evaluasi kinerja aparatur serta bagaimana kontribusinya terhadap efektivitas layanan administrasi publik modern.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemanfaatan teknologi digital dalam proses evaluasi kinerja aparatur? (2) Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi digital terhadap efektivitas layanan administrasi publik? (3) Apa saja faktor yang mendukung atau menghambat digitalisasi evaluasi kinerja aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan pemanfaatan teknologi digital dalam evaluasi kinerja aparatur; (2) Menganalisis kontribusi teknologi digital terhadap efektivitas pelayanan administrasi publik; dan (3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses digitalisasi evaluasi kinerja aparatur. Penelitian ini memberikan manfaat teoretis dalam memperkaya literatur mengenai digitalisasi evaluasi kinerja aparatur dan transformasi birokrasi sektor publik pada era digital. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat sarana digital, dan mengoptimalkan sistem evaluasi kinerja berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan relevansi pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik dan evaluasi kinerja. (Farhan & Ahyaruddin, 2025) menegaskan bahwa evaluasi kinerja pelayanan publik merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas layanan, meskipun sering kali menghadapi

hambatan dalam aspek objektivitas dan pemanfaatan data. Penelitian (Yulanda & Adnan, 2023) menunjukkan bahwa transformasi digital terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui percepatan alur kerja dan penguatan akuntabilitas administrasi. Sementara itu, (Rayani, 2025) meneliti aplikasi Mang Bagja sebagai sistem pelayanan kepegawaian di Bapenda Kota Bandung dan menemukan bahwa penggunaan aplikasi digital mampu meningkatkan efektivitas monitoring kinerja aparatur, meskipun masih terhambat oleh kurangnya kemampuan teknis sebagian pegawai. Ketiga penelitian tersebut secara umum menekankan manfaat digitalisasi, namun belum secara spesifik membahas integrasi teknologi digital dalam evaluasi kinerja aparatur di tingkat pemerintahan lokal, khususnya kecamatan yang memiliki karakteristik berbeda dari lembaga pemerintah kota atau provinsi.

Research gap dari penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada minimnya kajian mengenai implementasi teknologi digital dalam evaluasi kinerja pada tatanan birokrasi tingkat kecamatan yang memiliki tantangan tersendiri seperti keterbatasan sarana, sumber daya manusia, dan tingkat literasi digital. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada evaluasi pelayanan publik secara umum atau penggunaan aplikasi tertentu, namun belum menganalisis secara mendalam bagaimana digitalisasi evaluasi kinerja aparatur berpengaruh langsung terhadap efektivitas layanan administrasi publik di pemerintahan daerah tingkat bawah. Novelty dari penelitian ini adalah memberikan perspektif baru mengenai integrasi teknologi digital sederhana dalam proses evaluasi kinerja aparatur kecamatan serta kontribusinya terhadap modernisasi pelayanan publik, sekaligus memberikan pemetaan faktor pendukung dan penghambat implementasinya pada unit pemerintahan yang memiliki karakteristik unik.

Secara konseptual, kerangka berpikir penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara teknologi digital, evaluasi kinerja aparatur, dan efektivitas layanan administrasi publik. Pemanfaatan teknologi digital diasumsikan dapat meningkatkan objektivitas, kecepatan, akurasi data, dan transparansi proses evaluasi kinerja (Qomariyah et al., 2025). Pada akhirnya, perbaikan proses evaluasi tersebut berpengaruh pada peningkatan efektivitas layanan administrasi publik yang diberikan kepada masyarakat (Gunawan et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini bertumpu pada teori administrasi publik modern, teori evaluasi kinerja aparatur, serta konsep transformasi digital sektor publik. Tinjauan pustaka penelitian ini mencakup kajian mengenai digitalisasi birokrasi, sistem evaluasi kinerja aparatur, pelayanan publik modern, serta implementasi teknologi dalam organisasi pemerintahan. Seluruh basis teori ini menjadi landasan analitis untuk mengkaji fenomena digitalisasi evaluasi kinerja aparatur pada tingkat kecamatan sebagai bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam pemanfaatan teknologi digital dalam evaluasi kinerja aparatur serta pengaruhnya terhadap efektivitas layanan administrasi publik (Anggito & Setiawan, 2018). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap realitas empiris, pengalaman aparatur, serta dinamika kerja digital dalam konteks birokrasi tingkat kecamatan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder seperti dokumen evaluasi kinerja, arsip penggunaan aplikasi digital, dan laporan administrasi rutin (Arifin & Pramuja, 2024). Seluruh data tersebut diperoleh dari aktivitas aparatur di Kantor Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Moleong, 2017). Observasi dilakukan terhadap proses kerja aparatur, terutama pada penggunaan aplikasi presensi online, sistem informasi kepegawaian, serta platform komunikasi digital (Gunawan, 2016). Wawancara mendalam dilakukan dengan camat, kepala seksi, staf administrasi, dan operator teknologi informasi yang terlibat langsung dalam proses evaluasi kinerja berbasis digital. Adapun studi dokumentasi digunakan untuk menelaah arsip dan data digital yang digunakan sebagai instrumen pendukung evaluasi kinerja aparatur (Pramuja & MR, 2024).

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan terkait digitalisasi evaluasi kinerja, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk melihat hubungan antara penggunaan teknologi digital dan efektivitas layanan publik (Zahroh & Pramuja, 2025). Kesimpulan ditarik secara bertahap melalui proses verifikasi dan triangulasi sumber serta teknik. Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, yakni Agustus hingga November 2025, bertempat di Kantor Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala sebagai lokasi utama penelitian (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Evaluasi Kinerja Aparatur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Kecamatan Tabunganen telah mengimplementasikan berbagai instrumen digital dalam proses evaluasi kinerja yang secara nyata mengubah pola kerja birokrasi menuju arah yang lebih modern. Penggunaan aplikasi presensi online menjadi inovasi awal yang memperkuat aspek kedisiplinan aparatur karena mekanisme pencatatan kehadiran dilakukan secara real time dengan titik lokasi tertentu (geo-tagging). Hal ini membuat proses pengawasan kehadiran menjadi lebih akurat dan mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi data, yang sebelumnya sering ditemui dalam presensi manual. Data presensi yang terekam otomatis juga menjadi komponen penting dalam penilaian disiplin pegawai, termasuk keterlambatan, ketidakhadiran, dan mobilitas saat melaksanakan tugas lapangan.

Sementara itu, pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) berkontribusi besar dalam mewujudkan proses evaluasi kinerja yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan terdokumentasi (Hidayanto, 2025). Aparatur menggunakan SIK untuk merekam kegiatan harian (daily report), unggahan dokumen pendukung, hingga penyusunan laporan bulanan yang nantinya menjadi dasar penilaian kinerja oleh pimpinan. SIK tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan administratif, tetapi juga sebagai alat pemantauan kinerja berbasis indikator sehingga pimpinan dapat menilai capaian kerja setiap aparatur secara lebih objektif. Data kinerja yang tersimpan di SIK memungkinkan dilakukannya analisis perkembangan kinerja dari waktu ke waktu, sekaligus memudahkan identifikasi aparatur yang berprestasi maupun yang memerlukan pembinaan.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa media komunikasi digital seperti WhatsApp Group, Telegram, dan e-mail memainkan peran strategis dalam mendukung kelancaran proses koordinasi internal. Platform ini menjadi sarana utama penyampaian instruksi kerja, pengumpulan laporan harian, serta diskusi teknis terkait pelayanan administrasi publik. Kecepatan penyampaian informasi melalui media digital berkontribusi langsung terhadap percepatan pengambilan keputusan dan respons aparatur dalam

menyelesaikan berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Berbeda dengan pola kerja sebelumnya yang mengandalkan surat manual dan rapat tatap muka, komunikasi berbasis digital jauh lebih efisien dan memungkinkan monitoring berjenjang secara cepat oleh pimpinan kecamatan.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa digitalisasi memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Setiap aktivitas aparatur yang berkaitan dengan tugas pelayanan publik terekam dalam jejak digital baik melalui presensi, dokumentasi kegiatan lapangan, maupun laporan kinerja berbasis aplikasi. Jejak digital ini menjadi bukti objektif yang dapat diverifikasi sewaktu-waktu, sehingga mengurangi bias subjektivitas dalam penilaian. Hal ini menciptakan mekanisme evaluasi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip good governance (Pramuja et al., 2024). Masyarakat pun merasakan dampak dari perubahan ini melalui pelayanan yang lebih cepat, terstandar, dan dapat diprediksi (*predictable services*).

Namun, penelitian juga mengidentifikasi bahwa pemanfaatan teknologi digital belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu tantangan utama adalah variasi literasi digital antaraparatur. Aparatur muda dan staf dengan latar belakang pendidikan teknologi relatif mudah mengoperasikan aplikasi digital, sedangkan aparatur senior sering mengalami kesulitan dalam melakukan unggahan dokumen, mengakses aplikasi tertentu, atau memahami fitur teknis pada SIK. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan kualitas laporan kinerja antarpegawai dan berdampak pada akurasi data evaluasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur internet—terutama ketika koneksi melemah pada jam pelayanan padat—menyebabkan beberapa aparatur membutuhkan waktu lebih lama dalam mengunggah laporan atau melakukan presensi.

Terlepas dari kendala tersebut, secara keseluruhan hasil penelitian memperlihatkan bahwa digitalisasi evaluasi kinerja telah menjadi motor penggerak modernisasi layanan administrasi publik di Kecamatan Tabunganen. Instrumen digital yang digunakan tidak hanya mempermudah aparatur dalam melaksanakan tugas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat melalui proses yang lebih efisien, responsif, dan akuntabel. Digitalisasi ini sejalan dengan tuntutan transformasi birokrasi di era digital yang mengharuskan aparatur bekerja lebih cepat dan berbasis data. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dalam evaluasi kinerja tidak hanya merupakan inovasi teknis, tetapi juga menjadi strategi fundamental dalam meningkatkan efektivitas layanan administrasi publik modern pada level pemerintahan kecamatan.

Dampak Pemanfaatan Teknologi Digital terhadap Efektivitas Layanan Administrasi Publik

Implementasi teknologi digital dalam evaluasi kinerja aparatur Kecamatan Tabunganen terbukti membawa dampak yang signifikan terhadap efektivitas layanan administrasi publik, terutama dalam aspek kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas pelayanan. Penggunaan aplikasi digital tidak hanya memperbaiki mekanisme internal birokrasi, tetapi juga mengubah cara aparatur memberikan layanan kepada masyarakat. Teknologi presensi online, misalnya, memungkinkan pimpinan untuk memantau kehadiran dan mobilitas aparatur secara real time sehingga kedisiplinan kerja meningkat dan aparatur dapat lebih cepat memberikan layanan ketika dibutuhkan. Ketepatan waktu ini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi publik, terutama pada layanan dasar seperti pembuatan surat keterangan, legalisasi dokumen, dan administrasi kependudukan.

Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) berkontribusi terhadap peningkatan akurasi data kinerja yang kemudian menjadi dasar pengukuran efektivitas layanan. Ketika data kinerja terdokumentasi dengan baik, pimpinan dapat mengidentifikasi potensi ketidakefisienan, beban kerja yang

tidak seimbang, serta aparaturnya yang membutuhkan pendampingan. Proses evaluasi yang lebih objektif ini berdampak pada pembagian tugas yang lebih proporsional, sehingga tugas pelayanan publik dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan aktivitas evaluasi, tetapi juga memperbaiki pola kerja aparaturnya secara keseluruhan.

Media komunikasi digital seperti WhatsApp Group, Telegram, dan e-mail juga memberi dampak besar terhadap efektivitas pelayanan publik. Platform ini digunakan untuk menyampaikan instruksi, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan keliling, dan mempercepat alur konfirmasi terkait pengajuan layanan administrasi masyarakat. Sebelumnya, proses komunikasi yang lambat sering menyebabkan penundaan pelayanan, terutama dalam pengurusan berkas yang membutuhkan verifikasi berjenjang. Dengan kehadiran komunikasi digital, proses ini menjadi lebih cepat, ringkas, dan terdokumentasi, sehingga meminimalkan risiko miskomunikasi antaraparturnya.

Dampak yang paling terasa oleh masyarakat adalah peningkatan kualitas pelayanan dari sisi waktu, kejelasan prosedur, dan responsivitas aparaturnya. Digitalisasi membuat pelayanan lebih terjadwal dan tidak bergantung pada proses manual yang banyak memakan waktu. Waktu tunggu layanan menjadi lebih singkat karena data administratif sebagian besar telah dikelola secara digital. Beberapa responden masyarakat bahkan menyampaikan bahwa pelayanan terasa lebih pasti dan tidak lagi bergantung pada keberadaan fisik pejabat tertentu, karena hampir semua informasi dapat diakses dan dikonfirmasi melalui sistem digital atau melalui kanal komunikasi resmi kecamatan.

Selain itu, digitalisasi juga berdampak terhadap peningkatan transparansi. Masyarakat dapat lebih mudah menelusuri jejak layanan dan mengetahui tahapan pengurusan dokumen. Aparaturnya pun lebih berhati-hati dalam bekerja karena seluruh aktivitas mereka terekam sistem. Kondisi ini menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan selaras dengan prinsip administrasi publik modern. Meski demikian, dampak positif digitalisasi masih menghadapi sejumlah batasan. Keterbatasan literasi digital pada sebagian aparaturnya membuat proses pelayanan tidak selalu berjalan seragam. Ketika aparaturnya yang memiliki keterampilan digital rendah menghadapi pelaporan kinerja atau verifikasi data layanan, proses pelayanan dapat terhambat. Selain itu, kendala jaringan internet terutama pada jam pelayanan padat masih menjadi hambatan yang mempengaruhi efektivitas layanan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi memang memberikan dampak besar, tetapi tetap membutuhkan dukungan sistem yang stabil dan peningkatan kemampuan teknis aparaturnya.

Secara keseluruhan, digitalisasi evaluasi kinerja telah memberikan kontribusi nyata terhadap modernisasi pelayanan administrasi publik di tingkat kecamatan. Proses kerja menjadi lebih sistematis, akurat, dan berbasis data. Aparaturnya dapat bekerja lebih fokus pada pelayanan inti, sementara beban administratif manual terus berkurang melalui otomatisasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital bukan hanya inovasi instrumental, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, adaptif, dan relevan dengan tuntutan era digital.

Faktor Pendukung dan Penghambat Digitalisasi Evaluasi Kinerja Aparaturnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses digitalisasi evaluasi kinerja aparaturnya di tingkat kecamatan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan. Dari sisi pendukung, komitmen pimpinan kecamatan menjadi elemen yang paling menentukan

karena berperan sebagai penggerak utama dalam mengarahkan kebijakan transformasi digital, menyediakan dukungan administratif, serta memastikan seluruh aparatur mengikuti perubahan. Komitmen tersebut tercermin dari kebijakan internal yang mendorong penggunaan aplikasi digital, penetapan target evaluasi kinerja berbasis sistem, serta pengalokasian anggaran untuk peningkatan sarana teknologi. Selain itu, ketersediaan perangkat teknologi dasar seperti komputer, laptop, dan perangkat mobile turut mempercepat adopsi sistem digital. Meskipun belum sepenuhnya merata, ketersediaan perangkat ini memudahkan aparatur untuk mengakses, menginput, dan memverifikasi data evaluasi secara mandiri.

Budaya kerja aparatur yang mulai adaptif juga menjadi faktor pendukung penting. Perubahan perilaku kerja menuju pola yang lebih terbuka terhadap inovasi, terutama pada generasi aparatur yang lebih muda, memperlihatkan adanya kesiapan sumber daya manusia dalam menerima digitalisasi. Adaptasi ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan aplikasi komunikasi internal, pemanfaatan formulir digital untuk pelaporan, serta inisiatif pegawai dalam memecahkan kendala teknis sederhana secara mandiri. Secara sosial-organisasional, faktor ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan mental dan sikap kerja aparatur.

Di sisi lain, digitalisasi evaluasi kinerja menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Variasi literasi digital aparatur menjadi masalah paling dominan. Aparatur dengan kemampuan teknologi rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memahami menu aplikasi, menginput data evaluasi, serta menafsirkan output digital. Ketimpangan literasi digital menyebabkan pelaksanaan evaluasi tidak berjalan seragam, sehingga memperlambat proses kompilasi data kinerja. Keterbatasan jaringan internet, terutama di waktu tertentu atau di unit layanan tertentu, juga menjadi kendala yang cukup signifikan karena mempengaruhi stabilitas akses aplikasi dan kecepatan unggah data. Ketergantungan pada konektivitas yang tidak stabil menjadikan proses evaluasi sering tertunda.

Selain itu, ketiadaan sistem evaluasi kinerja yang sepenuhnya terintegrasi turut menghambat optimalisasi digitalisasi. Saat ini beberapa proses masih dilakukan secara campuran antara digital dan manual, mengakibatkan duplikasi pekerjaan, ketidaksinkronan data, dan meningkatnya potensi human error. Hambatan ini semakin diperburuk oleh minimnya pelatihan teknis yang diberikan secara berkala. Kurangnya program pelatihan menyebabkan aparatur tidak memiliki kesempatan untuk memperbarui kompetensi teknologi, sehingga kemampuan mereka tidak berkembang seiring kemajuan sistem. Secara keseluruhan, berbagai hambatan tersebut membuat digitalisasi evaluasi kinerja belum mencapai efektivitas maksimum dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

Pembahasan

Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Evaluasi Kinerja Aparatur

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital di Kecamatan Tabunganen telah mengubah pola kerja birokrasi ke arah yang lebih terstandar, cepat, dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan konsep *digital governance* yang menekankan integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik (Dunleavy & Margetts, dalam teori digital-era governance) (Sarinah, 2025). Implementasi aplikasi presensi online, Sistem Informasi Kepegawaian (SIK), serta media komunikasi digital mendukung pergeseran tersebut dengan memberikan mekanisme evaluasi kinerja yang lebih objektif dan terdokumentasi (Charty Seti Andina, 2023).

1. Presensi Online dan Penguatan Disiplin Aparatur

Penggunaan aplikasi presensi berbasis geo tagging terbukti meningkatkan akurasi data kehadiran. Temuan ini konsisten dengan teori *performance monitoring* yang menyatakan bahwa teknologi dapat meminimalkan moral hazard dan manipulasi data melalui otomatisasi pencatatan (Van Dooren et al., 2015).

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan (Rayani, 2025) yang menemukan bahwa aplikasi Mang Bagja meningkatkan transparansi kehadiran aparatur meskipun masih terkendala literasi digital pegawai. Dalam konteks kantor kecamatan Tabunganan, sistem presensi online tidak hanya berdampak pada kedisiplinan, tetapi juga menjadi dasar penilaian objektif terhadap indikator disiplin pegawai, sesuai dengan prinsip evaluasi kinerja berbasis angka kredit dan bukti kerja (*evidence-based appraisal*).

2. Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan Integrasi Data Kinerja

Pemanfaatan SIK sebagai alat pencatatan aktivitas harian sejalan dengan teori *Human Resource Information System* (HRIS) yang menekankan fungsi sistem digital dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data kinerja secara terstruktur (Kavanagh & Johnson, 2018) (Reska Rahmatullah, 2025). Penelitian ini menunjukkan bahwa SIK memudahkan pimpinan dalam memantau capaian kinerja secara berkala. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Suharti & Mariam, 2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi memungkinkan percepatan alur kerja dan meningkatkan akuntabilitas administrasi publik. SIK di Tabunganan bahkan memperkuat konsep *data-driven evaluation*, di mana keputusan kinerja didasarkan pada bukti digital, bukan penilaian subjektif semata. Integrasi data kinerja dalam SIK juga selaras dengan teori sistem informasi manajemen yang memandang data digital sebagai alat strategis untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan organisasi.

3. Media Komunikasi Digital dan Efisiensi Koordinasi

Penggunaan WhatsApp Group, Telegram, dan e-mail menunjukkan bahwa komunikasi internal telah bertransformasi dari pola konvensional menuju komunikasi digital yang cepat dan responsif. Dalam literatur *electronic government communication*, penggunaan platform digital mampu mempercepat koordinasi lintas unit, mengurangi beban administratif, serta mempercepat respons pelayanan (Jaeger & Bertot, 2010) (Suaib, 2025).

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan (Prasetyo & Nur'Aini, 2025) yang menegaskan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi kerja melalui percepatan alur informasi. Dengan komunikasi digital, pimpinan Kecamatan Tabunganan dapat melakukan supervisi berjenjang secara *real time*, yang sebelumnya sulit dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau surat fisik.

4. Transparansi, Akuntabilitas, dan Penerapan Good Governance

Jejak digital (*digital footprint*) dari presensi, laporan kegiatan, dan dokumentasi lapangan memperkuat aspek transparansi evaluasi kinerja. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Temuan ini didukung penelitian (Babullah et al., 2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi evaluasi kinerja meningkatkan objektivitas penilaian melalui bukti-bukti digital yang dapat diverifikasi kapan saja. Dalam konteks penelitian terdahulu, temuan ini juga serupa dengan hasil penelitian (Siagian et al., 2025) yang menyebut bahwa digitalisasi mampu mengurangi subjektivitas penilaian kinerja dan meningkatkan integritas data pelayanan.

5. Kendala Literasi Digital dan Infrastruktur Teknologi

Meskipun banyak manfaat, hasil penelitian juga menunjukkan hambatan utama berupa variasi literasi digital antaraparatur. Hal ini sejalan dengan penelitian (Redhana, 2024) yang menemukan kesenjangan literasi digital pegawai menjadi faktor yang memperlambat adopsi aplikasi digital. Dalam teori *technology acceptance model (TAM)*, faktor kemampuan pengguna (*perceived ease of use*) sangat memengaruhi penerimaan teknologi. Keterbatasan jaringan internet yang tidak stabil juga menghambat proses unggah laporan dan presensi. Kondisi ini sesuai dengan teori *ICT capability gap*, yang menyebut bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kualitas infrastruktur teknologi (Heeks, 2006). Dengan demikian, hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga terkait kesiapan organisasi (*organizational readiness*).

Dampak Pemanfaatan Teknologi Digital terhadap Efektivitas Layanan Administrasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam evaluasi kinerja aparatur Kecamatan Tabunganen memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas layanan administrasi publik, khususnya dalam aspek kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas. Penggunaan aplikasi presensi online memungkinkan pimpinan memantau kehadiran dan mobilitas aparatur secara real time, sehingga kedisiplinan meningkat dan layanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan lebih cepat. Hal ini sejalan dengan teori digital governance dan performance management, yang menekankan bahwa teknologi dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan publik melalui pemantauan kinerja berbasis data (Henman & Graham, 2020).

Selain itu, Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) berperan penting dalam meningkatkan akurasi data kinerja, sehingga pimpinan dapat mengidentifikasi ketidakefisienan, ketidakseimbangan beban kerja, dan aparatur yang memerlukan pendampingan. Proses evaluasi yang lebih objektif ini memungkinkan pembagian tugas lebih proporsional, sehingga layanan administrasi publik dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar operasional. Temuan ini mendukung prinsip evidence-based evaluation dalam manajemen sumber daya manusia, di mana keputusan operasional dan strategis didasarkan pada data yang terdokumentasi (Kavanagh & Johnson, 2018) (Hides et al., 2018).

Penggunaan media komunikasi digital seperti WhatsApp, Telegram, dan e-mail turut meningkatkan efektivitas koordinasi internal. Proses penyampaian instruksi, konfirmasi pengajuan layanan, dan koordinasi kegiatan pelayanan menjadi lebih cepat dan terdokumentasi, mengurangi risiko miskomunikasi antaraparatur. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Yulanda & Adnan, 2023), yang menyatakan bahwa digitalisasi komunikasi internal mempercepat alur kerja dan mendukung responsivitas layanan publik.

Dampak yang dirasakan masyarakat mencakup pelayanan yang lebih cepat, prosedur yang jelas, dan responsivitas aparatur yang meningkat. Digitalisasi mengurangi ketergantungan pada proses manual, sehingga waktu tunggu layanan lebih singkat dan informasi dapat diakses melalui sistem digital atau kanal komunikasi resmi kecamatan. Selain itu, transparansi layanan meningkat karena masyarakat dapat menelusuri tahapan pengurusan dokumen, sementara aparatur bekerja lebih berhati-hati karena seluruh aktivitas terekam sistem. Temuan ini sesuai dengan prinsip good governance dan administrasi publik modern, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting peningkatan kualitas pelayanan (Arifin & Pramuja, 2024).

Meski demikian, penelitian juga menemukan kendala berupa variasi literasi digital antaraparatur dan keterbatasan jaringan internet pada jam pelayanan padat, yang dapat mempengaruhi konsistensi efektivitas layanan. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya dukungan infrastruktur yang stabil dan peningkatan kapasitas teknis aparatur, sebagaimana dijelaskan dalam teori *technology acceptance model* (TAM) dan konsep *ICT capability gap* (Heeks, 2006).

Secara keseluruhan, digitalisasi evaluasi kinerja telah memberikan kontribusi nyata terhadap modernisasi layanan administrasi publik di tingkat kecamatan. Proses kerja menjadi lebih sistematis, akurat, dan berbasis data, sementara beban administratif manual berkurang. Pemanfaatan teknologi digital bukan sekadar inovasi teknis, tetapi juga menjadi pilar strategis dalam mewujudkan layanan publik yang efektif, adaptif, dan relevan dengan tuntutan era digital, sekaligus mendukung tercapainya efektivitas administrasi publik modern di Kecamatan Tabunganen.

Faktor Pendukung dan Penghambat Digitalisasi Evaluasi Kinerja Aparatur

Proses digitalisasi evaluasi kinerja aparatur di tingkat kecamatan dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan penghambat yang saling terkait. Dari sisi pendukung, komitmen pimpinan kecamatan menjadi elemen kunci karena berperan sebagai motor penggerak transformasi digital. Komitmen ini tercermin melalui kebijakan internal yang mendorong penggunaan aplikasi digital, penetapan target evaluasi kinerja berbasis sistem, serta pengalokasian anggaran untuk peningkatan sarana teknologi. Temuan ini sejalan dengan teori *transformational leadership*, yang menekankan peran pimpinan dalam mendorong inovasi dan perubahan organisasi (Bass & Riggio, 2006). Selain itu, ketersediaan perangkat teknologi dasar seperti komputer, laptop, dan perangkat mobile memudahkan aparatur untuk mengakses, menginput, dan memverifikasi data evaluasi secara mandiri, sesuai dengan prinsip *technology infrastructure readiness* dalam literatur *e-government* (Heeks, 2006).

Budaya kerja aparatur yang mulai adaptif juga menjadi faktor pendukung penting. Aparatur, terutama generasi muda, menunjukkan kesiapan mental dan sikap terbuka terhadap inovasi digital melalui peningkatan penggunaan aplikasi komunikasi internal, pemanfaatan formulir digital, dan inisiatif pemecahan masalah teknis secara mandiri. Temuan ini mendukung perspektif *socio-technical systems theory*, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan adaptasi perilaku kerja (Baxter & Sommerville, 2011).

Di sisi lain, digitalisasi evaluasi kinerja menghadapi beberapa hambatan signifikan. Variasi literasi digital aparatur menjadi kendala dominan, di mana aparatur dengan kemampuan teknologi rendah kesulitan memahami aplikasi, menginput data, dan menafsirkan output digital. Ketimpangan literasi ini sejalan dengan temuan Rayani (2025) yang menunjukkan bahwa kesenjangan kemampuan teknologi pegawai dapat memperlambat implementasi sistem digital. Selain itu, keterbatasan jaringan internet terutama pada jam pelayanan padat mengganggu stabilitas akses aplikasi dan kecepatan unggah data, menimbulkan penundaan dalam proses evaluasi.

Ketiadaan sistem evaluasi kinerja yang sepenuhnya terintegrasi turut menjadi hambatan. Beberapa proses masih dilakukan secara campuran antara digital dan manual, yang menyebabkan duplikasi pekerjaan, ketidaksinkronan data, dan meningkatnya potensi human error. Hambatan ini diperparah oleh minimnya pelatihan teknis berkala, sehingga aparatur tidak memiliki kesempatan untuk memperbarui kompetensi digital sesuai perkembangan sistem. Hal ini sejalan dengan teori *human capital development* dalam konteks

e-government, yang menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas teknologi (Kavanagh & Johnson, 2018).

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi evaluasi kinerja aparatur bukan hanya bergantung pada teknologi dan perangkat, tetapi juga pada komitmen pimpinan, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur dan pelatihan yang memadai. Interaksi antara faktor pendukung dan penghambat menentukan sejauh mana digitalisasi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik, sehingga strategi implementasi harus mempertimbangkan kedua aspek ini secara simultan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, digitalisasi evaluasi kinerja aparatur di Kecamatan Tabunganen terbukti menjadi strategi efektif dalam meningkatkan efektivitas layanan administrasi publik modern. Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi presensi online, Sistem Informasi Kepegawaian (SIK), serta media komunikasi digital, telah mempercepat alur kerja, meningkatkan akurasi dan transparansi penilaian kinerja, serta memperkuat koordinasi antaraparatur, sehingga layanan publik menjadi lebih cepat, akuntabel, dan responsif. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, kesiapan perangkat teknologi, dan budaya kerja aparatur yang adaptif, sementara kendala utama berasal dari variasi literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, dan sistem evaluasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Dengan demikian, optimalisasi digitalisasi evaluasi kinerja memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sarana teknologi, dan pelatihan berkelanjutan agar transformasi birokrasi dapat berjalan lebih efektif dan pelayanan publik modern dapat tercapai secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrizqan, M. F. (2025). *EVALUASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGGUNAKAN E-KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH UTARA*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifin, Z., & Pramuja, A. D. (2024). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: PEMBENTUKAN MADRASAH QUR'AN SEBAGAI SARANA DAKWAH DI PERUMAHAN PONDOK ABADI JOGOYUDAN LUMAJANG. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 249–258.
- Babullah, R., Qomariyah, S., Neneng, N., Natadireja, U., & Nurafifah, S. (2024). Kolaborasi Metode Diskusi Kelompok Dengan Problem Solving Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Aqidah Akhlak. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(2), 65–84.
- Bunda, M. R., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Analisis Efektifitas Kebijakan Pengaduan Publik dalam Pelayanan Adminitrasi Publik. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 189–196.
- Charty Seti Andina, N. P. M. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Catatan Kinerja dalam Penilaian*

- Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor*. Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61, 61–62.
- Farhan, R., & Ahyaruddin, M. (2025). Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 118–153.
- Gunawan, I. (2016). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bumi Aksara.
- Gunawan, I., Alamsyah, A., & Nugraha, M. (2024). Evaluasi Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Pinang Mas Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 104–118.
- Heeks, R. (2006). Understanding and measuring eGovernment: international benchmarking studies. *UNDESA Workshop, “E-Participation and E-Government: Understanding the Present and Creating the Future”*, Budapest, Hungary, 27–28.
- Henman, P., & Graham, T. (2020). The structure of the online state: towards a web ecology perspective. *Government Information Quarterly*, 37(2), 101440.
- Hidayanto, M. (2025). *STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEBERLANJUTAN PUSKEMAS DI KOTA SEMARANG: INTEGRASI INOVASI DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DIGITAL*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hides, L., Quinn, C., Cockshaw, W., Stoyanov, S., Zelenko, O., Johnson, D., Tjondronegoro, D., Quek, L.-H., & Kavanagh, D. J. (2018). Efficacy and outcomes of a mobile app targeting alcohol use in young people. *Addictive Behaviors*, 77, 89–95.
- Lumbanraja, V., Rustiyana, R., Ibrahim, A. H. H., & Riyanto, A. (2025). *Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia: Konsep, Perkembangan, Prinsip dan Peran*. Star Digital Publishing.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Remaja Rosdakarya.
- Pramuja, A. D., Ishari, N., Arifin, Z., & Lubis, A. H. (2024). Sustainable Governance and the Future of Islamic Boarding Schools: Strengthening Human Resources Based on Religious Values: Tata Kelola Berkelanjutan dan Masa Depan Pesantren: Penguatan Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai-Nilai Keagamaan. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 24–38.
- Pramuja, A. D., & MR, G. N. K. (2024). Islamic Values and Da’wah-Based Human Resource Development Strategy Through Syarifuddin Outbound And Leadership Development (SOLID). *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 10(2), 151–162.
- Prasetyo, H., & Nur’Aini, F. (2025). Studi Efektivitas Aplikasi Sistem Integrasi Sekretariat dan Unsur Penunjang (Si-SEKRUP) di Lingkungan Diskominfo Jawa Tengah. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(3), 138–151.
- Qomariyah, E., Ramdan, D. S., Leilasariyanti, Y., Mardikawati, B., Heryyanoor, H., Supangat, S., Zulkifli, Z., Januru, L., Raspati, M. I., & Afdylah, R. (2025). *Manajemen Kinerja*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Rayani, R. N. (2025). *Evaluasi sistem pelayanan kepegawaian pada aplikasi Manajemen Bandung Kinerja (Mang Bagja) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Redhana, I. W. (2024). *Literasi Digital: Pedoman Menghadapi Society 5.0*. Samudra Biru.
- Reska Rahmatullah, S. E. (2025). *Teknologi HRIS: Mengoptimalkan Efisiensi Organisasi*. Takaza Innovatix Labs.
- Rismawati, S. E., & Mattalata, S. E. (2018). *Evaluasi Kinerja: Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Sarinah, M. A. P. (2025). KONSEP DAN TEORI GOVERNANCE DI ERA. *Digital Governance: Konsep, Strategi Dan Implementasinya Di Indonesia*, 19.
- Siagian, A. A., Muzayana, A. F., Fadhillah, Z., Febrianti, F. R., & Dinata, R. S. (2025). Manajemen Kinerja di ERA Digital: Dari Absensi Ke Analisis Data. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03), 2255–2264.
- Suaib, H. E. (2025). KEAMANAN SIBER DAN PERLINDUNGAN DATA. *Digital Governance: Konsep, Strategi Dan Implementasinya Di Indonesia*, 89.
- Suharti, T., & Mariam, M. (2025). Penerapan Sistem Informasi Manajemen sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Pendidikan di Madrasah. *At Tadbir: Islamic Education Management Journal*, 3(1), 65–74.
- Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). *Performance management in the public sector*. Routledge.
- Widiyastutin, D., & Yeni, H. (n.d.). Optimalisasi Leadership Transformation Melalui Digital Attendance dan Sistem Informasi Manajemen pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Mamuju Tengah. *Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 9(1), 1–16.
- Yulanda, A., & Adnan, M. F. (2023). Transformasi digital: Meningkatkan efisiensi pelayanan publik ditinjau dari perspektif administrasi publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 103–110.
- Zahroh, A., & Pramuja, A. D. (2025). *ISLAMIC SCIENTIFIC TRADITION IN THE MODERN ERA : A Phenomenological Study on the Integration of Education in Islamic Boarding Schools and Higher Education*. 6(1), 102–118.